

NOTULEN
RAPAT KERJA KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Jam : 10.30 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Komisi I
Agenda : Rapat Mitra dengan Satpol PP terkait usul pembentukan Perda baru pengganti Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

I. PESERTA RAPAT

➤ **DPRD**

1. Drs. Julius Uly, M.Si	Ketua
2. Ir. Aambrosius Reda	Wakil Ketua
3. Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum	Sekretaris
4. Aloysius Malo Ladi	Anggota
5. Antonius Landi	Anggota
6. Stevanus Come Rihi	Anggota
7. David I. Boimau	Anggota

➤ **Staf Sekretariat DPRD Provinsi NTT**

1. Patrico Firmansyah Tjandring, S.H.
2. Rafaelsius Linus

II. JALANNYA RAPAT SERTA PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Drs. Julius Uly, M.Si. Membuka Rapat Mitra dengan Satpol PP.

Kasatpol PP

- Memaparkan materi (terlampir)
- Kondisi anggaran yang sangat terbatas dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar
- Usulan ini kalau bisa diterima dan menjadi propemperda 2026

III. TANGGAPAN DEWAN

1. Drs. Julius Uly, M.Si

- Jika usulan Perda ini urgent dan mendesak maka memang perlu ditindaklanjuti;
- Memperhatikan tahapan-tahapan dalam penyusunan Ranperda dan pembiayaannya;
- Anggaran belum tersedia dan harusnya sudah diajukan 1 bulan sebelum tahun berganti, namun ada klausul pengecualian jika hal tersebut mendesak dan memiliki urgensi;
- Kenapa usul perda ini dilimpahkan ke DPRD ketika anggarannya ada di pemerintah.

2. Stevanus Come Rihi

- Usulan ini wajib kita tindaklanjuti, saran saya kepada Pimpinan Komisi agar hal ini menjadi Perda Prakarsa DPRD;
- Tentu dari pemerintah melihat ada urgensi yang penting sehingga mendorong Perda ini melalui Komisi I untuk menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

3. David I. Boimau

- Mekanisme pengusulan Ranperda menjadi Propemperda sudah terlambat diajukan untuk dibahas. Jika te tap ingin dimasukan maka harus melalui perubahan APBD 2026 dengan berkoordinasi dengan Sekwan untuk melihat ketersediaan anggaran terlebih dahulu. Dari sisi kelengkapan administrasi kita harus berkolaborasi dalam menyusun Ranperda ini apabila bisa diakomodir;
- Setelah membaca surat yang disampaikan, permasalahan utamanya adalah anggaran dari pemerintah yang tidak ada untuk mengakomodir usul perda ini sehingga dilimpahkan ke DPRD.

4. Antonius Landi

- Urgensinya belum cukup kuat untuk mengganti Perda ini;
- Menyayangkan keterlambatan pembahasan usul perda ini karena sudah terlambat untuk masuk dalam Propemperda;
- Saya sepakat ini menjadi Perda Inisiatif DPRD, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan.

5. Aloysius Malo Ladi, S.E.

- perlu kita apresiasi usul Perda ini, namun kita coba lihat celah yang memungkinkan agar saat anggaran perubahan dibahas dapat memasukan usul Perda ini;
- Jika terdapat urgensi yang mendesak, usul Perda ini perlu di bahas lebih lanjut.

6. Ambrosius Reda

- Saya sepakat untuk usul Perda ini masuk dalam perubahan dan akan disampaikan ke Pak Sekwan terkait pembahasannya.

7. Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum

- Untuk meramu Perda ini perlu ditelaah lebuh lanjut agar ketika dikonsultasi ke Kementerian tidak menjadi kesalahan;
- Menyarankan agar tanggapan dari pandangan dan pertanyaan teman-teman lain disampaikan secara tertulis.

Kasatpol PP

- Menyampaikan permohonan maaf jika usul ini terlambat, karena semua baru bergabung dalam Satpol PP dan baru pulang pendidikan di minggu kedua bulan desember;
- Perda No. 2 Tahun 2019 ini lahir dari inisiatif DPRD;
- Berkaitan dengan PAD, melaui usul Perda ini kami mengakomodir dan mendukung 25 OPD dengan salah satunya melakukan tilang gabungan untuk mendulang PAD;
- Terkait naskah akademik dari DPRD, kami akan mendampingi dan mengusulkan pendukungnya.

IV. DOKUMENTASI



V. PENUTUP

Demikian Notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 14 Januari 2026

**KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,**

Handwritten signature of DRS. JULIUS ULY, M.SI.

DRS. JULIUS ULY, M.SI.